

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 2.1. Sejarah berdirinya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan

Dinas Pendapatan Daerah dibentuk pada tahun 2000 setelah pemekaran dari kabupaten Kampar. Kemudian pada tahun 2009 Dinas Pendapatan Daerah digabung dengan bagian keuangan, pembukuan, verifikasi dan bagian aset sekretariat daerah Kabupaten Pelalawan dengan alasan dibuat satu atap pengelolaan keuangan yaitu penerimaan dan pengeluaran keuangan dengan nama Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD).

Pada tahun 2013 DPKKD tersebut dipisah lagi menjadi Dinas Pendapatan Daerah, sedangkan bagian keuangan, pembukuan, verifikasi dan bagian aset tetap disekretariat daerah kabupaten Pelalawan di kantor Bupati Pelalawan. Dalam wacananya pada tahun 2017 kedua instansi tersebut akan digabung kembali dengan nama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Pelalawan

Dasar hukum Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan ialah peraturan daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan (lembaran daerah Nomor 4 tahun 2008) dijabarkan lagi dengan peraturan bupati Pelalawan Nomor 32 tahun 2009 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Kewenangan Dinas Pendapatan Kabupaten Pelalawan sesuai pasal 96 ayat a sampai dengan ayat p peraturan daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan (lembaran daerah tahun 2008 nomor 4). Maka kewenangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan terdiri dari 15 (lima belas) kewenangan yaitu:

1. Perencanaan dan pengendalian
2. Pelatihan bidang pendapatan
3. Alokasi sumber daya manusia potensial bidang pendapatan
4. Penelitian yang mencakup wilayah kabupaten bidang pendapatan
5. Penyusunan kebijaksanaan teknis serta program kerja
6. Penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan pendaptan daerah
7. Pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah
8. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Penyusunan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pendapatan daerah
10. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang pendapatan yang wajib dilaksanakan
11. Penyusunan terencana bidang pendapatan
12. Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa
13. Penyelenggaraan system bidang pendapatan daerah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan pelatihan

15. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan sebuah peraturan perundang-undangan bidang pendapatan daerah.

## **2.2. Visi dan Misi**

### **2.2.1. Visi**

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan yang hendak dicapai hingga akhir tahun 2016 adalah sebagai berikut”

“terwujudnya pendapatan daerah yang akuntabel menuju kemandirian pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pelalawan “

- a. Akuntabel maksudnya adalah dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sumber inputnya, prosesnya, maupun peruntukan atau pemanfaatan outputnya.
- b. Kemandirian dalam arti kata dapat berdiri sendiri tanpa bergantung kepada daerah lain.

### **2.2.2. Misi**

Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2016

- a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)
- b. Tersedianya aparatur yang handal dan profesional
- c. Tersedianya data yang akurat dan tersinkronisasi
- d. Meningkatkan kualitas layanan prima bagi masyarakat
- e. Sistem pengelolaan administrasi dan manajemen yang berbasis teknologi informasi

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka dinas pendapatan daerah kabupaten pelalawan merumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk operasional yang terarah berupa tujuan dan sasaran yakni:

### **2.2.3. Tujuan**

- a. Meningkatkan kegiatan intensifikasi pendapatan daerah
- b. Meningkatkan kegiatan ekstensifikasi pendapatan daerah
- c. Meningkatkan pelayanan prima kepada wajib pajak
- d. Meningkatkan sosialisasi produk-produk hukum pajak dan retribusi daerah

### **2.2.4. Sasaran**

- a. Terlaksananya tingkat pencapaian target pendapatan daerah minimal 20% dari tahun sebelumnya
- b. Terlaksananya penggalian sumber-sumber pendapatan daerah yang baru ditetapkan dengan peraturan daerah
- c. Terlaksananya pelayanan dan penyampaian SKPD, SKRD dan administrasi tepat waktu
- d. Terlaksananya penyelesaian administrasi pajak dan retribusi daerah yang cepat dan tertib
- e. Terlaksananya penagihan pajak dan retribusi daerah dengan baik dan akuntabel
- f. Terlaksananya pencapaian realisasi pendapatan daerah
- g. Terpenuhnya kebutuhan fasilitas kerja yang memadai
- h. Terlaksananya hubungan kerja yang nyaman harmonis

#### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Terlaksananya kegiatan sosialisasi produk hukum tentang pajak dan retribusi daerah
- j. Terwujudnya kesadaran wajib pajak atau retribusi daerah dalam memenuhi kewajibannya
- k. Terlaksananya sistem dan prosedur administrasi pendapatan daerah oleh unit kerja pengelolaan pajak atau retribusi daerah
- l. Terlaksananya pendidikan pelatihan teknis bagi pegawai

### 2.3. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh instansi, maka perlu adanya perencanaan dan perumusan struktur organisasi. Hal ini dimaksud karena struktur organisasi merupakan alat dan kerangka dasar yang membantu organisasi dalam mencapai tujuan.

Agar semua itu dapat tercapai maka orang-orang yang bekerja sama harus diatur sedemikian rupa sehingga masing-masing mengerti atas tugas yang telah dilakukan. Oleh karena itu suatu bagan yang memberikan gambaran secara sistematis tentang hubungan kerja setiap individu organisasi yang tergambar dalam struktur organisasi.

Struktur organisasi ini mempunyai arti dan peran yang sangat penting, baik dalam suatu perusahaan maupun lembaga atau instansi pemerintah, tanpa ada struktur organisasi yang baik maka akan sangat sulit bagi suatu perusahaan atau instansi untuk menjalankan segala aktifitasnya secara terarah dan sulitnya untuk mencapai tujuan secara optimal.

Struktur organisasi kantor dinas pendapatan daerah kabupaten pelalawan

terdiri dari:

1. Kepala Dinas : May Hendra,S.Sos, M.Si
2. Sekretariat : Martias, SmHK
  1. Kasubbag Program : Indrawati, SE
  2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian : Hayatun Nupus, SH
  3. Kasubbag Keuangan : Ernalliza Afia, SE, M.Si
3. Kabid PBB dan BPHTB : Surya Ananda, SE
  1. Kasi Penagihan, Keberatan dan Banding : Arizalk,SE
  2. Kasi Pend, Peni, Pene, dan Peng Data : Hj.T.Fira Mauliya, SH
  3. Kasi Penerimaan : Indrawani, S.Kom, M.Si
4. Kabid Bagi Hasil dan Dana Perimbangan : Susiy Amiliana, Spi
  1. Kasi bagi Hasil Pajak : Siti Holijah, SH
  2. Kasi Bagi Hasil Lain-Lain : Syarifah Zahra Herlena, SE
  3. Kasi Bagi Hasil Bukan Pajak : Dian Maya Sari, S.Sos, M.Si
5. Kabid Pendaftaran dan Perhitungan : Sulastri S.Ag
  1. Kasi Penetapan : Zais Mala Dewi, SH
  2. Pj. Kasi Pendaftaran dan Pendataan : Deni Pusvita, SE
  3. Kasi Perhitungan : Yuli Hesti, SE
6. Kabid Pendapatan Asli Daerah : Edison, S.Pd
  1. Kasi Penagihan dan Keberatan : Jahlelawati, SE
  2. Pj. Kasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah : Muhammad Yusuf, S.Sos
  3. Kasi Penggalan Potensi PAD : Zahir, SH

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

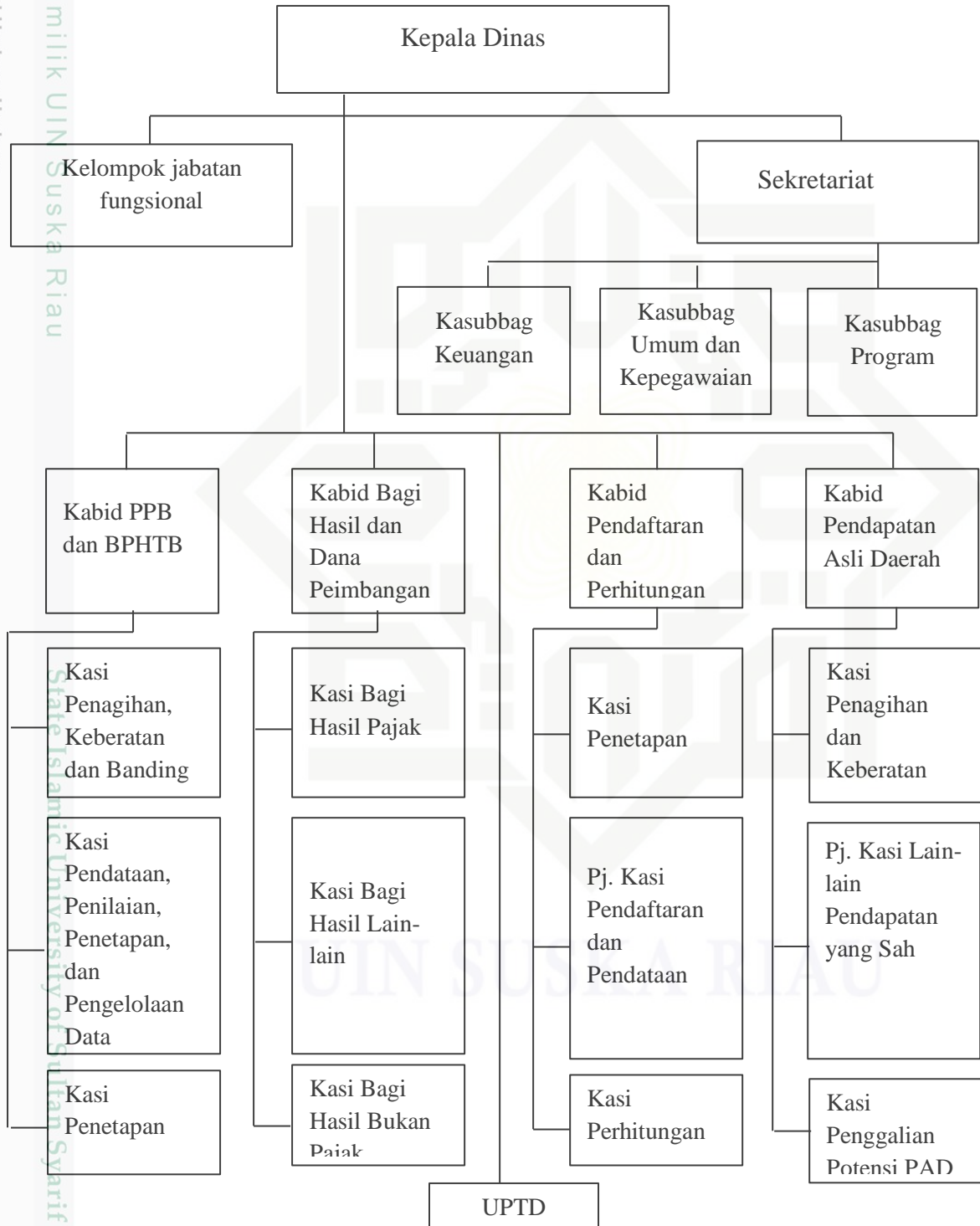
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Bagan 2.1

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **2.4. Uraian Tugas**

### **3.4.1. Kepala Dinas**

a. Dinas pendapatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah

b. Kepala dinas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi urusan pemerintah bidang pendapatan.

### **3.4.2. Sekretariat**

a. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah kepala dinas dan bertanggung jawab kepada kepala dinas

b. Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta evaluasi penyusunan program dan anggaran, ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan serta keuangan

### **3.4.3. Kasubbag Program**

a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas

b. menyiapkan bahan pengkoordinasian penyusunan program, monitor, evaluasi dan pelaporan

c. pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat

d. pengelolaan penyusunan anggaran



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. pengelolaan situs web

#### 3.4.4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

- a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas
- b. Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha
- c. Pengelolaan barang atau jasa
- d. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi
- e. Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian

#### 3.4.5. Kasubbag Keuangan

- a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas
- b. Penatausahaan keuangan
- c. Penyusunan pelaporan keuangan

#### 3.4.6. Bidang PBB dan BPHTB

- a. Bidang PBB dan BPHTB dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas
- b. Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang PBB dan BPHTB termasuk didalamnya penagihan, keberatan dan banding PBB dan BPHTB, pendataan, penilaian, penetapan, dan pengelolaan data PBB dan BPHTB, serta penerimaan PBB dan BPHTB.


**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.4.7. Bidang Bagi Hasil dan Dana Perimbangan

- a. Bidang Bagi Hasil dan Dana Perimbangan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas
- b. Bidang Bagi Hasil dan Dana Perimbangan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, perimbangan bagi hasil pajak, bagi hasil lain-lain dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi pelaporan dan penerimaan lain-lain

### 3.4.8. Bidang Pendaftaran dan Perhitungan

- a. Bidang pendaftaran dan perhitungan termasuk didalamnya pendataan dan penetapan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas
- b. Pendataan dan penetapan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pendaftaran dan perhitungan.

### 3.4.9. Bidang Pendapatan Asli Daerah

- a. Bidang Pendapatan Asli Daerah dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas
- b. Kepala bidang Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis.